

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana India mengendalikan pertentangan antara norma kesetaraan gender internasional dan realitas sosial yang dipengaruhi oleh sistem kasta dan budaya patriarki. Meskipun instrumen hukum internasional seperti CEDAW telah diratifikasi dan PBB terus mendorong implementasi kebijakan, dinamika politik dan struktur sosial yang ada sebenarnya menunjukkan resistensi sekaligus adaptasi. Dengan demikian, dapat digambarkan bahwa kondisi ini bentuk kontestasi reaktif, di mana India berupaya mempertahankan tradisi dan budaya lokalnya di tengah tekanan norma global.

Dalam Penelitian ini terlihat bahwa pada tahap pembentukan norma penolakan tidak terlalu terlihat begitu menonjol. Namun, resistensi dan pertentangan terjadi pada tahap Referring melalui Social Validation dan Impelementing melalui Cultural Validation. Dimana Ketika pada social validation norma sosial india menolak, menegosiasikan dan menginterpretasikan makna. Seperti, pada saat aktor domestik seperti aparat dan Lembaga pemerintah yang lambat dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap Perempuan dalit. Selain itu, ada wacana berkelanjutan tentang UCC dan penolakan terhadap feminisme kerap muncul di ranah politik, tetapi kebijakan terkait pemberdayaan perempuan terus diimplementasikan dengan LSM dan aktivis feminisme. Ini mencerminkan bahwa India belum sepenuhnya merangkul prinsip kesetaraan gender. Pemerintah cenderung mengejar kebijakan gender dalam kerangka pendidikan, pembangunan

ekonomi dan stabilitas sosial, tetapi kebijakan ini gagal mengatasi akar sebenarnya dari ketidaksetaraan yaitu budaya patriarki dan malah membiarkan struktur penindasan tetap ada, meskipun disamarkan sebagai narasi perubahan.

Ketika masuk pada Cultural Validation hal yang dilakukan pun sama, masyarakat kasta atas dan patriarki memperlakukan Perempuan dalit dengan tidak baik, melakukan pelecehan, pemerkosaan dan kekerasan karena adanya sebuah norma lokal sosial yang sudah mengakar kuat di masyarakatnya. Kondisi Perdebatan dan pertentangan mengenai norma kesetaraan gender internasional di mana India berupaya mempertahankan tradisi dan budaya lokalnya di tengah tekanan dari norma global. Sistem kasta yang masih kuat dan budaya patriarki terus mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender. Sebagian besar orang India masih percaya bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan harus menjunjung tinggi martabat mereka dengan mengurus pekerjaan rumah saja dan mematuhi norma sosial yang berlaku. Cara pandang ini seringkali menyebabkan kesetaraan gender dianggap berlebihan atau bahkan sebagai ancaman terhadap tradisi yang telah lama ada. Namun, gerakan perempuan di India terus berkembang, khususnya di kalangan perempuan Dalit, yang kini semakin berani menentang kekerasan, diskriminasi dan ketidakadilan yang mereka alami. Mereka tidak hanya bergantung pada hukum atau kebijakan negara tetapi juga terlibat dalam perlawanan melalui kampanye, media dan aksi sosial. Dengan demikian, perubahan dalam isu kesetaraan gender di India tidak hanya didorong oleh tekanan internasional atau kebijakan pemerintah tetapi juga muncul dari perjuangan masyarakatnya itu sendiri. Jadi proses ini bukanlah proses satu arah dari atas ke

bawah, melainkan penuh dengan negosiasi, konflik, dan perdebatan di dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh sistem kasta dan budaya patriarki.

India sebagai sebuah negara berada dalam situasi yang kompleks. Komitmen formalnya terhadap norma-norma internasional tetap ada dan diakui, tetapi resistensi domestik dari bidang politik, sosial dan budaya terus menjadi kekuatan utama dalam membentuk kembali norma kesetaraan gender. Masa depan norma ini di India tidak hanya bergantung pada kebijakan dan kerangka hukum, tetapi juga pada kemampuan negara untuk mengatasi masalah internalnya yang lebih mendasar. Pada akhirnya, keberhasilan norma kesetaraan gender akan ditentukan tidak hanya oleh perjanjian internasional tetapi juga oleh kekuatan suara komunitas, terutama perempuan Dalit dan kemauan negara untuk menciptakan ruang bagi kesetaraan yang tidak hanya selaras dengan standar global tetapi juga mengatasi tantangan nyata di tingkat domestik.

## **5.2 Saran**

Sebagai saran, India perlu memahami bahwa perdebatan tentang kesetaraan gender adalah bagian dari proses normal pembentukan norma. Norma tidak secara otomatis diterima oleh masyarakat tetapi mengalami proses reinterpretasi, negosiasi, dan bahkan penolakan. Oleh karena itu, negara tidak dapat hanya membuat kebijakan tetapi negara juga harus menciptakan ruang dialog antara norma hukum internasional dan nilai-nilai lokal yang masih dipengaruhi oleh sistem kasta dan budaya patriarki. Selain itu, perempuan Dalit perlu dilibatkan sebagai aktor kunci dalam proses ini. Perubahan akan lebih kuat jika muncul dari partisipasi dan pengalaman masyarakat di tingkat akar rumput, bukan hanya dari keputusan pemerintah. Dengan cara ini, kesetaraan gender tidak berhenti pada

komitmen formal tetapi benar-benar dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian lebih lanjut dapat menggali lebih dalam proses kontestasi norma di tingkat lokal, misalnya di desa-desa atau dalam kelompok-kelompok tertentu, untuk lebih memahami bagaimana masyarakat menafsirkan dan menegosiasikan norma-norma kesetaraan gender. Penelitian lebih lanjut juga harus fokus pada pengalaman langsung perempuan dalam menghadapi kebijakan negara, sehingga analisis meluas melampaui kebijakan nasional untuk menangkap realitas sosial yang lebih konkret. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan studi lapangan guna mendapatkan pendekatan yang lebih konkret dan komprehensif terhadap dinamika kontestasi di India.

